

TAJUK RENCANA

Menyeimbangkan Urusan Kesehatan dan Ekonomi

DUA hal inilah yang menjadi perhatian Presiden Jokowi saat memimpin rapat kabinet terbatas di Istana Merdeka Senin lalu. Berkaitan itu Presiden meminta Komite dan Satgas Penanganan Covid-19 beserta seluruh gubernur di Indonesia menyeimbangkan dengan baik urusan penanganan pandemi Covid-19 dengan masalah ekonomi. Presiden juga memaparkan data bahwa per 22 November 2020 rata-rata kasus aktif Covid-19 di seluruh Tanah Air 12,78 persen atau lebih rendah dari rata-rata kasus aktif dunia yaitu 28,41 persen. Tingkat kesembuhannya juga membaik, yakni mencapai 84,03 persen dibanding kesembuhan dunia 69,20 persen.

Angka yang dipaparkan Presiden Jokowi makin menumbuhkan optimisme masyarakat bahwa pada saatnya nanti kita benar-benar terbebas dari pandemi Covid-19. Namun kapan saatnya, tergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat menaati protokol kesehatan (prokes). Menyeimbangkan urusan penanganan pandemi dan ekonomi sebagaimana diingatkan Presiden, memang tidak semudah yang dibayangkan. Apalagi, kebijakan di masing-masing daerah berbeda satu dengan lainnya. Ada daerah yang super ketat dalam memberlakukan prokes, namun ada pula yang biasa-biasa saja, dan ada pula yang terkesan longgar.

Barangkali berangkat dari fenomena itulah Presiden perlu mengingatkan Komite dan Satgas serta gubernur untuk menyeimbangkan dua kepentingan tersebut. Ini artinya, keduanya tak bisa dipisahkan, kepentingan kesehatan harus diutamakan, tapi roda perekonomian juga harus jalan terus. Meskipun masing-masing daerah berbeda dalam hal kebijakan penerapan prokes, namun prinsipnya sama, yakni keselamatan rakyat harus diutamakan. Keselamatan di

sini tentu bukan diartikan sebatas berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan, melainkan juga menyangkut kepentingan ekonomi. Masyarakat sehat, namun ekonomi keluarganya berantakan dan miskin, pun bisa menjadi ancaman keselamatan.

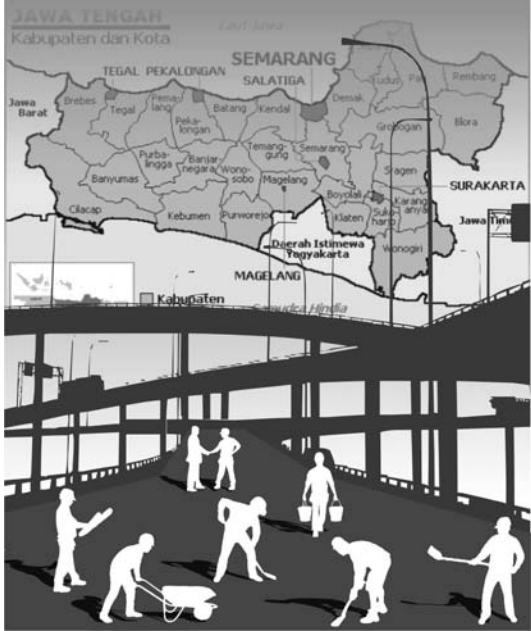
Agaknya, pemerintah pusat ingin memberi keleluasaan pada daerah untuk mengelola penanganan pandemi Covid-19 asalkan sesuai standar prokes, juga memberi kebebasan dalam mengelola perekonomian daerah, sehingga keduanya bisa diseimbangkan. Meski demikian, pemerintah pusat juga tidak lepas tangan, namun tetap memberi insentif bagi mereka yang terkena dampak pandemi, antara lain melalui bantuan langsung tunai (BLT), baik kepada pelaku usaha kecil maupun menengah. Tak hanya itu, pemerintah juga memberi subsidi gaji bagi para buruh yang kini realisasinya sudah mencapai 82 persen. Berkaitan itu, kita mendorong pemerintah agar tetap mengedepankan asas pemerataan dan keadilan, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

Kita mendukung langkah penyeimbangan antara urusan penanganan pandemi dengan urusan ekonomi. Namun kita juga perlu melakukan evaluasi terhadap program-program yang selama ini dijalankan pemerintah, terutama terkait dengan penanganan dampak pandemi di berbagai daerah. Evaluasi ini diperlukan untuk menyusun program selanjutnya agar benar-benar tepat sasaran dan tak ada yang tececer atau luput dari perhatian pemerintah. Kalangan masyarakat miskin tentu menjadi prioritas utama sasaran program, karena mereka-lah yang paling merasakan dampak pandemi Covid-19. Barulah berikutnya menyasar pada masyarakat ekonomi menengah, yang notabene banyak yang jatuh miskin diterpa pandemi. □

Rasional Tol Yogyakarta - Bawen

Haris Zaky Mubarak

Yogyakarta. Apalagi dilihat dari perkembangannya, Provinsi Jateng tak hanya berperan sebagai penghubung kekuatan distribusi ekonomi nasional tapi menjadi pilar kekuatan produksi nasional. Beberapa hasil produksi ekonomi Jateng seperti industri makanan, furnitur, fashion, otomotif, dan logistik merupakan contoh kemajuan produksi yang dihasilkan Provinsi Jateng.



Menelusik dari sudut pandang sejarah Indonesia, kawasan Provinsi Jateng merupakan kawasan jalur perdagangan yang strategis. Hal itu setidaknya dapat dilihat dari motif pihak kolonial yang melakukan berbagai ekspansi secara luas pada berbagai jalur-jalur perdagangan di Jawa. Sistem liberalisasi sektor swasta melalui *Agrarische Wet* (1870) membuka investasi modal Barat dalam usaha perkebunan swasta di wilayah *Vorstenlanden*. Mobilisasi pesat yang dilakukan manusia dan barang kenaikan bersamaan tersambungannya kawasan *Vorstenlanden* dengan Semarang yang menjadi pusat administrasi Hindia-Belanda. Kondisi inilah yang gilirannya



Pikiran Pembaca

Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email pikiranpembaca@gmail.com. Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

Menyikapi Pandemi Masa Transisi

RAMBU-RAMBU kegiatan pembelajaran tatap muka di masa pandemi sudah diberikan pemerintah. Hal tersebut disampaikan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021. Pembukaan sekolah tidak lagi berdasarkan zonasi penyebaran Covid-19. Keputusan pembukaan pembelajaran tatap muka dilakukan berjenjang dengan penentu akhir komite dan orang tua siswa.

Kesiapan pemerintah daerah, sekolah, dan orang tua siswa terkait rencana pembukaan aktivitas belajar tatap muka masih beragam. Setiap pihak perlu mengedepankan prinsip utama yaitu keselamatan siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Setiap pilihan kegiatan harus mempertimbangan segala akibat dan risikonya. Oleh karena itu, persiapan pembukaan kegiatan pembelajaran tatap muka harus diperhitungkan secara matang.

Dengan kondisi sarana dan prasarana pendukung protokol kesehatan yang berbeda di setiap daerah dan sekolah, maka perlu dilakukan simulasi sebelum kegiatan pembelajaran tatap muka. Selain itu adanya regulasi yang mengatur durasi pembelajaran tatap muka, materi ajar, skema keberangkatan dan kepu-

langan siswa untuk meminimalisir potensi siswa terpapar virus Korona.

Sekolah perlu menggandeng orang tua siswa, masyarakat sekitar, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan untuk ikut mengecek dan mengevaluasi kesiapan sarana dan prasarana protokol kesehatan sekolah. Tersedianya tempat cuci tangan dengan air mengalir, sabun cuci tangan, cairan pembersih, persediaan masker, alat pengecek suhu badan, dan penataan tempat kegiatan dengan jarak tertentu pada tiap sekolah perlu diperhatikan. Kalau pendukung protokol kesehatan belum siap karena keterbatasan sumber daya atau lainnya, pemerintah daerah harus membantu sampai sekolah bersangkutan siap.

Saat simulasi atau pembelajaran tatap muka juga perlu melibatkan instansi layanan kesehatan. Misalnya bantuan pengecekan kesehatan bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan yang memiliki gejala. Memfasilitasi pelibatan tenaga kesehatan dan peran puskesmas untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan pada tiap satuan pendidikan. Semoga dengan sinergitas semua pihak terkait, pelaksanaan pembelajaran tatap muka tidak menciptakan kluster baru penyebaran Covid-19 di masa transisi ini. □

***) Suprpti, Guru SDN Kenaran 1 Prambanan, Sleman.**

BANK Indonesia (BI) kembali melonggarkan kebijakan moneter melalui suku bunga acuan *7 Days Reverse Repo Rate*, yang diturunkan sebesar 25 bps. Dari 4.0% sejak Juli 2020 menjadi 3.75% pada 19 November lalu. Di samping itu, BI juga menurunkan tingkat suku bunga *deposit facility* (3.0%) dan suku bunga *lending facility* (4.5%) yang masing-masing penurunannya sebesar 25 bps. Kebijakan pelonggaran suku bunga acuan diambil dalam rangka untuk mendorong stabilitas perekonomian domestik. Terutama untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia agar tumbuh berkelanjutan di era pandemi.

Walaupun ekonomi Indonesia sempat membaik dari triwulan sebelumnya berada pada minus 5.32%, tetapi pada Triwulan III 2020 masih terkontraksi sebesar minus 3.49% (y-o-y). Beberapa komponen pengeluaran PDB Indonesia masih terkontraksi, salah satunya pengeluaran konsumsi terkontraksi minus 4.04% (y-o-y) pada Triwulan III 2020. Permintaan domestik yang belum kuat menjadi penyebab utama komponen pengeluaran PDB Indonesia masih negatif. Bahkan, rendahnya permintaan domestik dicerminkan pada tingkat inflasi inti sebesar 1.44% pada Oktober 2020 (y-o-y).

Mempercepat

Penurunan tingkat suku bunga acuan juga bertujuan agar mempercepat realisasi anggaran APBN 2020 agar menopang program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Trend pertumbuhan sektor bisnis dan industri Indonesia juga semakin membaik ditandai pertumbuhan ekspor mencapai 12.4% (q-o-q) pada Triwulan III 2020, yang sebelumnya terkontraksi -12.83% (q-o-q) pada Triwulan II 2020. Hal ini menunjukkan

Abi Fadillah

trend permintaan barang dalam negeri cenderung mengalami perbaikan pada Triwulan III 2020. Kedepannya, penurunan suku bunga diharapkan dapat mendorong penurunan bagi suku bunga simpanan dan suku bunga kredit di perbankan.

Selain dengan menekan suku bunga acuan sampai ke 3.75% pada November 2020, BI juga telah melonggarkan Giro Wajib Minimum (GWM) sampai Rp 680.9 Triliun. Langkah yang diambil BI melalui ekspansi moneter ini dikarenakan kredit perbankan masih terkontraksi 0.47% atau hanya tumbuh 0.12% pada Triwulan III 2020. Realisasi kredit yang cenderung rendah menunjukkan fungsi BI sebagai intermediasi menurun akibat pandemi Covid-19. Sejauh ini BI telah menerapkan kebijakan makroprudensial akomodatif dalam mendukung

agar uang beredar terus bertambah. Namun, memang tidak dapat dipungkiri bahwa persepsi pelaku bisnis, dunia usaha, dan permintaan masyarakat masih memiliki ketidakpastian yang tinggi. Karena, pasar uang di Indonesia tidak menunjukkan adanya keseimbangan baik dari permintaan uang dan penawaran uang.

Menjaga

Sementara itu, perkembangan ekonomi global juga menjadi pertimbangan bagi BI dalam menurunkan suku bunga acuan dan pelonggaran GWM. Bank

membuat perubahan dan terjadinya pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat lokal

Di tengah masa sulit pandemi Covid-19 seperti sekarang, pelaksanaan pembangunan infrastruktur ekonomi seperti pembangunan tol Yogyakarta - Bawen boleh jadi menjadi satu upaya rasional pemerintah guna memacu laju pemulihan ekonomi secara efektif. Intensifnya pembangunan infrastruktur Jateng tentu sangat diharapkan dapat meningkatkan pemerataan kualitas hidup banyak wilayah di Jateng.

Tiga Pusat

Terjadinya pemerataan kualitas hidup jelas menjadi tujuan utama. Terlebih selama ini pemerintah daerah telah mendorong berbagai pertumbuhan ekonomi daerah melalui pusat pertumbuhan baru. Ada tiga pusat pertumbuhan Jateng yang menjadi kawasan unggulan. Kawasan itu meliputi wilayah Cilacap Raya, Soloraya, dan Semarang Raya. Adanya tiga pusat pertumbuhan ini pun dikembangkan sesuai basis bisnis yang dimiliki kawasan tersebut.

Pembangunan tol Yogyakarta-Bawen jelas akan membantu akses ekonomi daerah. Penambahan infrastruktur mendorong banyak kemandirian masyarakat daerah untuk termotivasi membangun pasar usaha secara luas. Ini bentuk stimulus penting bagi upaya besar Pemerintah Indonesia dalam agenda pemulihan ekonomi nasional, akibat dampak Covid-19. □

***) Haris Zaky Mubarak MA,**
Direktur Eksekutif Jaringan Studi Indonesia

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinkr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Bank Indonesia Pangkas Suku Bunga

Sentral Amerika Serikat The Fed menahan tingkat suku bunganya pada level rendah yaitu 0% - 0.25% pada November 2020. Suku bunga The Fed yang cenderung rendah seharusnya menjadi kesempatan Indonesia. Walaupun negara dilanda pandemi, pemerintah harus menjaga kepastian dan kredibilitas kepada investor asing untuk menarik *capital inflow* ke Indonesia. Sampai periode Oktober-November 2020, tercatat aliran *capital inflow* ke Indonesia sebesar US\$ 3.68 miliar.

Kedepannya tentunya Bank Indonesia akan terus menjaga suku bunga agar tetap terkendali. Dalam arti, bisa jadi BI tetap menahan suku bunga acuan masih pada angka 3.75% pada beberapa bulan kedepan. Namun, sebaliknya BI juga dapat terus melonggarkan suku bunga sampai ekonomi nasional menunjukkan tanda-tanda *recovery*. □

***) Abi Fadillah,**
Asisten Dosen FE UII

Pojok KR

Pemda DIY minta penegakan prokes diperketat.

-- Aparatnya juga diperketat.

Simulasi vaksinasi Covid-19 terus dilakukan.

-- Sosialisasi harus masif.

Tokoh agama harus jadi teladan bertutur yang baik.

-- Bila bertutur buruk, mungkin itu bukan tokoh agama.

Berabe

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjianti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustitwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Aftiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Drs Sihono HT, Agung Purwandono. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'. Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display..Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarua...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris). Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00 /mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Per cetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab per cetakan

Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rekening: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Semarang :** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti. **Magelang :** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani. **Gunungkidul :** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.